FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH BREBES

(Studi Empiris UPPD Brebes Tahun 2016-2020)

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana stara -1 di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Muhadi Setiabudi

Di Susun Oleh

Nama : Ismi Nur Kholifah

NIM : 62201180005

Program Studi : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI

BREBES

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya Ismi Nur Kholifah menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya ajukan dengan judul **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Brebes (Studi Empiris UPPD Brebes Tahun 2016-2020)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleng orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Brebes, 29 Juli 2022

Penulis,

Ismi Nur Kholifah

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Brebes

(Studi Empiris UPPD Brebes Tahun 2016-2020)

Oleh :

Nama	: Ismi Nur Kholifah
NIM	: 62201180005
Program Studi	: Akuntansi
Bidang Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Hilda Kumala Wulandari, S.E., M.Si	**Dumadi,S.Mn., M.M**
NIDN. 0606079101	**NIDN. 0630077602**

Mengetahui,

Kaprodi Akuntansi

Anisa Sains Kharisma, S.Ak., M.Ak

NIPY. 19941002 202108 2 190

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Brebes

(Studi Empiris UPPD Brebes Tahun 2016-2020)

Oleh :

Nama	: Ismi Nur Kholifah
Nomor Mahasiswa	: 62201180005
Program Studi	: Akuntansi
Bidang Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan

Brebes, Agustus 2022

Disahkan oleh :

Pembimbing I	: Hilda Kumala Wulandari, S.E., M.Si	:.....
Pembimbing II	:Dumadi, S.Mn., M.M	:.....
Penguji	: Yenny Ernitawati, S.E., M.M., Ak	:.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhadi Setiabudi

Yenny Ernitawati, S.E., M.M., Ak

NIPY.19790302 201811 2 117

MOTTO

Setiap orang pasti punya mimpi, begitu juga saya, namun bagi saya yang paling penting adalah bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya, tapi adalah seberapa besar usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alkhamdulillah, atas berkat rahmat dan ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Alm Mama dan Bapak sertas kakak-kakak saya. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Dosen pembimbing saya ucapkan terimakasih atas bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

ABSTRAK

Besarnya tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Tengah termasuk Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes terdapat banyaknya wajib pajak yang menunggak membayar pajak. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak kendaraan seluruhnya untuk pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah brebes. Penelitian ini mengambil studi empiris di Kabupaten Brebes periode 2016-2020. Hal ini dikarenakan pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Populasi pada penelitian ini disajikan dalam adalah laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdapat di kantor UPPD Brebes tahun 2016-2020. Sampel dari penelitian ini menggunakan metode *sampling* jenuh sehingga sampel penelitian ini keseluruhan laporan jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Alat pengujian menggunakan SPSS versi 25 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, 2) jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, 3) pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bemotor dan ,4) jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The amount of arrears on motor vehicle tax payments in Central Java Province, including Brebes Regency. Brebes Regency has many taxpayers who are in arrears in paying taxes. The income generated from the vehicle tax is entirely for regional development. This study aims to identify and analyze the factors that influence motor vehicle tax revenue in the Brebes area. This research takes an empirical study in Brebes Regency for the 2016-2020 period. This is because taxes are mandatory contributions collected by the government from the public (taxpayers) to cover routine state expenditures and development costs without remuneration that can be appointed directly. The population in this study presented in is a report on the realization of motor vehicle tax receipts at the UPPD Brebes office in 2016-2020. The sample of this study uses the saturated sampling method so that the sample of this study reports the total number of motor vehicles, population, economic growth and motor vehicle tax revenues for the 2016-2020 period. This study uses secondary data. The test tool uses SPSS version 25 . The results of this study indicate that: 1) the number of motorized vehicles has a significant effect on motor vehicle tax revenues, 2) the population has no significant effect on motor vehicle tax revenues, 3) economic growth has a significant effect on motor vehicle tax revenues and ,4) the number of motorized vehicles, population, and economic growth have a significant effect simultaneously on motor vehicle tax revenues.
***Keywords**: Number of Motorized Vehicles, Total Population, Economic Growth, Motor Vehicle Tax Revenue*

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWt atas berkat, rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **" Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Brebes".** Shalawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi umat islam. Semoga penelitian ini bermanfaat dan kebaikan dikemudian hari.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan mendapat gelar sarjana pada program studi Akuntansi di Universitas Muhadi Setiabudi. Penulis menyadarai sepenuhnya skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, baik isi, cara pengetikan maupun bahasanya yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan, akan tetapi berkat bantuan dan pembimbing dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan semestinya. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Roby Setiadi, S.Kom., M.M, selaku Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes.
2. Ibu Yenny Ernitawati, S.E., M.M., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ibu Anisa Sains Kharisma, S.Ak., M.Ak, selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

4. Ibu Hilda Kumala Wulandari, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing 1 yang selama ini membimbing dengan sabar,segala nasehat dan memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dan setiap pertemuan yang sangat bermanfaat.
5. Bapak Dumadi, S.Mn., M.M, selaku dosen pembimbing 2 yang selama ini membimbing dengan sabar,segala nasehat dan memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dan setiap pertemuan yang sangat bermanfaat.
6. Teruntuk Alm. Ibuku selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh perkuliahan. Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
7. Teruntuk Bapak dan kakak-kakak yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan prodi Akuntansi angkatan 2018 yang telah menyemangati satu sama lain.
9. Teruntuk sahabatku terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya selama menyusun skripsi.
10. Teruntuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Brebes, 08 Juni 2022

Ismi Nur Kholifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSRACT ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTRA ISI ..... **xii**
DAFTRA TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 27
1.3. Batasan Masalah 28
1.4. Rumusan Masalah 28
1.5. Tujuan Masalah 29
1.6. Manfaat Penelitian 29
BAB II **30**
TINJAUAN TEORI **30**
2.1.1 Teori Mutlak(Bakti) 31
2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 33
2.1.3 Pengertian Pajak 35
2.1.4 Fungsi Pajak 36
2.1.5 Jenis Penggolongan Pajak 37
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 39
2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 40
2.1.8 Jumlah Penduduk 43

2.1.9 Jumlah Kendaraan Bermotor 44
2.1.10 Pertumbuhan Ekonomi 45
2.2 Peneliti Terdahulu 46
2.3 Kerangka Pemikiran 57
2.4 Hipotesis 59
2.4.1 Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 59
2.4.2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 60
2.4.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 61
2.4.4. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ... 63
BAB III 66
METODE PENELITIAN 66
3.1. Metode Penelitian 66
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 66
3.2.1 Variabel Penelitian 66
3.2.2 Definisi Operasional Penelitian 67
3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 69
3.4 Populasi dan Sampel 70
3.5 Metode Analisi Data 70
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 71
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 71
3.5.3 Uji Heteroskedastitas 73
3.5.4 Uji Autokorelasi 73
3.5.5 Uji Regresi Linear Berganda 74
3.5.6 Uji Hipotesis 75
3.5.7 Koefisien determinasi (R2) 76
BAB IV 78
HASIL DAN PEMBAHASAN 78
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 78
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Brebes 78
4.1.2 Gambaran Umum UPPD Brebes 78

4.1.3 Visi dan Misi UPPD Brebes.....79
4.2 Hasil Analisis Data.....79
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....92
BAB V.....97
KESIMPULAN DAN SARAN.....97
5.1 Kesimpulan.....97
5.2 Saran.....98
DAFTAR PUSTAKA.....100
LAMPIRAN.....104

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1*Research Gap*.....20

1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor.....23

1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....23

1.4 Jumlah Penduduk.....25

1.5 Pertumbuhan Ekonomi.....25

2.1 Penelitian Terdahulu.....50

3.1 Rasio Efektivitas Pajak.....69

4.1 Hasil Uji Deskriptif.....80

4.2 Hasil Uji Normalitas.....82

4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....83

4.4 Hasil Uji Heteroskedastitas.....84

4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....85

4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....86

4.7 Hasil Uji Statistik t (Persial).....88

4.8 Hasil Uji Statistik F (Simultan).....90

4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....91

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.2 Karangka Pemikiran.....58

4.4 Hasil Uji Scatterplot.....84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1.Data Output SPSS Jumlah Kendaraan bermotor, Jumlah Penduduk,Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....104

2. Laporan Realisasi Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor..107

3. Surat Izin Penelitian.....109

4. Surat Balasan Penelitian.....110

5. Hasil Output SPSS.....111

6. Izin Penelitian Ke Kantor UPPD Brebes.....116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Pajak kendaran bermotor termasuk dalam jenis pajak provinsi. Di Brebes, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-undang No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disebut pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial.

Dalam hal ini pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah.Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang berada di wilayah Brebes. Dengan adanya SAMSAT wajib pajak sangat mudah untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Brebes melakukan

perbaikan layanan pajak, yaitu dengan adanya layanan Samsat *online* bagi pemilik kendaraan hendak membayar pajak dan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK. Selain itu juga tersediakan Samsat Keliling untuk melayani masyarakat atau desa-desa pelosok daerah guna untuk memudahkan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang termasuk sebagai sumber pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang dilaksanakan. Berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung yang digunakan untuk kemakmuran rakyat secara besar-besarnya. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan terhadap sumber daya kepada pemerintah. Ketentuan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar melakukan pemungutan pajak tersebut(Prawita, 2018). Objek pajak kendaraan bermotor merupakan kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang.

Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang menjadi subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi

atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Dimana tenaga kerja meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan memberikan banyak lapangan pekerjaan. Peningkatan pendapatan masyarakat atau tingkat kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi dari masyarakat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara yang adil, selaras dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, jenis pajak Kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2020 terdiri dari : a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak pengambilan bahan galian golongan C, g) pajak parkir.

Selain jenis pajak yang sudah ditentukan di atas, pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pajak lainnya berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak Propinsi meliputi : a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c) pajakbahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis

pajak daerah yang termasuk sebagai sumber pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintah daerah dalam usaha membiayai pembangunan daerah yang dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak faktor penerimaan perpajakan dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi makro dan faktor internal adalah adalah *tax base* (dasar pengenaan pajak) atau objek pajak dan tarif pajak.

Mardiasmo *et al* (2016) menyebutkan bahwa "Untuk melihat potensi penerimaan suatu daerah, dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel ekonomi dan variabel non ekonomi antara lain keadaan struktur ekonomi, jumlah penduduk, PDRB perkapita riil, tingkat inflasi, peningkatan cakupan penerimaan daerah, penyesuaian tarif, pengembangan baru, sumber pendapatan baru dan peraturan yang baru". Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Untuk terus dapat menjaga penerimaan pajak dan memaksimalkan pemungutannya, pemerintah telah melaksanakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.

Demi memaksimalkan potensi pajak sekaligus sebagai bentuk realisasi otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur pemungutan pajak di daerahnya masing-

masing. Sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pajak daerah yang memiliki potensi semakin meningkat adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari Pajak Kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut (Imanda, 2019)alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah: “Penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat.

Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak kendaraan bermotor nantinya akan dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan raya”.Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 merupakan sistem sentralisasi. Namun, pada tahun 1998 terjadi perombakan kebijakan. UU No. 2 Tahub 2021 tentang psikotropika. UU No. 23 Tahun 2014 memberikan suatu konsekuensi adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yang lebih besar. Akan tetapi, pada pelaksanaannya ternyata masih banyak terjadi ketidakjelasan dan tumpang tindih, sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. Kemudian, pada tahun 2014 disempurnakan kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Perubahan sistem sentralisasi menjadi

sistem desentralisasi memberikan konsekuensi bahwa setiap daerah harus mengelola segala urusan pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan salah satu faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah (Riduansyah dalam Aji, 2015). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah (Utami, 2014).

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan jaminan pelayanan publik yang akan semakin membaik, sehingga masyarakat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Guna meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas maka dilakukan reformulasi kebijakan. Reformulasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Reformulasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui UU No. 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar asas otonomi. Di era sekarang ini, kesadaran masyarakat akan wajib pajak masih rendah. Sebagai Negara yang berkembang memerlukan pembiayaan belanja Negara semakin lama semakin bertambah besar yang memerlukan penerimaan Negara. Penerimaan Negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri, dan pajak

merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar. Penerimaan negara dari sektor pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (Dumadi, *et al* 2020).

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi menyebabkan munculnya otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi atau kebijakan desentralisasi selama ini dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah (Kusuma, 2016). Secara rata-rata tingkat kemandirian provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2018 dikategorikan sedang yaitu sebesar 57,43%, namun dengan terjadinya krisis perekonomian global, mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan dimana perlambatan ini terjadi sejak tahun 2012 dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2015 yang kemudian hanya tumbuh sebesar 3,84% atau berada di bawah angka nasional yang mencapai 4,79% dengan posisi menurun menjadi ke-27 secara nasional.

Asumsi kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020 diantaranya adalah melalui optimalisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dengan cara menerapkan pajak progresif berkeadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Asumsi ini didukung oleh kontribusi salah satu pajak daerah yang berpotensi besar seiring dengan adanya pertambahan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat yaitu pajak kendaraan bermotor.Penerapan sistem online sebagai katalisator penerimaan pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor lain yang dianggap dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu dievaluasi guna mengetahui

sejauhmana pengaruh penerapan kebijakan sistem online dan faktor-faktor lain terhadap kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kinerja pajak kendaraan bermotor termasuk diantaranya pertumbuhan, kontribusi dan efektifitas sebelum dan sesudah diterapkannya sistem online perlu menjadi perhatian. Perbandingan antara jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai objek pajak dengan realisasi juga menjadi catatan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menganalisis pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.

Pencapaian kinerja pajak kendaraan bermotor yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan target yang harus dicapai pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung keberhasilan kebijakan pembangunan, namun keberhasilan kebijakan pembangunan daerah tentu saja juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak terkecuali dalam kebijakan perpajakan sektor kendaraan bermotor. Otonomi membawa dampak reformasi pada bidang perpajakan yakni memberikan perubahan terhadap sistem peneriman pajak, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak peneriman nilai (PPn), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm), pajak penghasilan (PPh), pajak migas,pertanian,kehutanan dan lain-lain. Sementara pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, pajak provinsi terdiri dari pajak kendaran bermotor, pajak bea balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak

reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir dan lain-lain (UU No. 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Semua pajak diharapkan dapat menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang bervariasi. Demi berhasilnya usaha pembangunan baik pusat maupun daerah,negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Prinsip manfaat, salah satu tujuan kegiatan pemerintah pada masyarakat adalah menciptakan manfaat dapat dinikmati oleh seluruh warga negara,baik sebagai konsumen maupun produsen. Apabila manfaat yang diterima masyarakat/warga negara dirasakan besar,maka warga negara akan bersedia untuk membayar manfaat tersebut juga dalam jumlah yang besar, seperti seperti kewajiban masyarakat dalam pembayaran pajak kenderaan bermotor. Pajak merupakan bagian dari penerimaan pemerintah. Adapun definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibedakan menjadi tiga golongan besar (Mangkoesubroto, 2013), yaitu :

a. Peranan Alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bias optimal dan mendukung efisiensi produksi.

b. Peranan Distribusi, yakni pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
c. Peranan Stabilisasi, yakni pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.

Setiap negara membutuhkan dana, untuk menyelenggarakan pemerintahan salah satu sumber dana yang lebih diandalkan pemerintah Indonesia adalah pajak. Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang. Pihak-pihak yang membayar suatu jenis pajak tertentu adalah orang atau Badan yang menjadi wajib pajak. Pemerintah dapat menetapkan berbagai jenis pajak yang tarifnya dapat bervariasi, antara lain disebabkan adanya perbedaan pada aspek teknis. Beberapa indikator yang digunakan dalam kaitannya dengan Penerimaan Pajak daerah antara lain PDRB, Inflasi, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, pendapatan perkapita dan tarif pajak . Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Maka Pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak adalah salah satu sektor pendukung yang sangat berpengaruh bagi Pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya demi tercapainya apa yang direncanakan maka Pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memungut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan bagi Negara sebagai salah satu cara mendapatkan pendapatan.

Pendapatan tersebut yaitu penerimaan yang penting bagi Pemerintah dalam menunjang pembangunan yang berguna membiayai proyek-proyek dan kegiatan Negara.

Dengan perkembangan era saat ini, otonomi daerah menjadi suatu tantangan besar bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh guna mendukung kemampuan keuangan suatu daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan Pemerintah di daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak menurut pengelolaannya bagi menjadi dua yaitu Pajak Pemerintah Pusat dan Pajak Pemerintah Daerah. Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan yang tercakup dalam Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu pajak daerah yang berkontribusi wajib kepada daerah yang secara otomatis terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa di dalamnya dan berdasarkan Undang-Undang tidak mendapatkan atau menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk berbagai keperluan sebuah daerah bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti wewenang pemungutan pajak daerah berada pada pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah daerah yang terakumulasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi terbagi menjadi 5 (lima) jenis, diantaranya :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi 9 (sembilan) jenis, diantaranya :

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoranc. Pajak Hiburan
c. Pajak Reklame
d. Pajak Penerangan Jalan
e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
f. Pajak Parkir
g. Pajak Air Tanah
h. Pajak Sarang Burung Walet
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BangunanPajak Bumi dan Bangunan

k. Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

l. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut Undang-Undang di atas, kita memperoleh kesimpulan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan seluruh kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang dapat digunakan di semua jenis jalan darat, dan jelas digerakkan menggunakan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang memiliki fungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi sumber tenaga gerak di kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda atau motor dan tidak melekat secara permanen, begitu juga dengan kendaraan bermotor yang pengoperasiannya di air.

Daerah Brebes merupakan daerah dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Sehingga pada sektor transportasi mengalami peningkatan, khususnya pada permintaan jumlah kendaraan bermotor baik yang beroda dua maupun roda empat di Brebes yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensial yang cukup besar bagi suatu daerah guna pembangunan dan lain-lain di wilayah tersebut. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini melibatkan 3 (tiga) Instansi Pemerintah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kepolisian, dan PT. Jasa Raharja. Di dalam proses pencatatan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Ada beberapa pelayanan di Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk memudahkan wajib pajak membayar kewajibannya yaitu SAMSAT Corner, SAMSAT Bus Keliling, SAMSAT Drive Thru dan Kantor SAMSAT yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1). Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menggariskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata baik materil dan spirituil berdasarkan UUD 1945, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23 A yang berbunyi : “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diupayakan melalui pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki daerah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah proporsi anggaran belanja yang memperhatikan juga peningkatan pelayanan pada sektor publik. Melihat perkembangan yang terjadi terhadap potensi pendapatan melalui pajak terutama di Kabupaten Nagan Raya, dari perbandingan perolehan daerah melalui pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki persentase sekitar 70 % dari seluruh pajak yang ada. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini didukung oleh adanya upaya pajak, efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Pengelolahan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Kesadaran wajib pajak yang tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kesadaran untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat. Wajib pajak yang paham atas pajaknya yaitu wajib pajak yang mengerti, mengetahui pajak yang harus dibayar untuk memenuhi kewajiban bayar pajaknya.

Wajib pajak, sering disingkat WP adalah orang pribadi badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak ba.dan (Dumadi, *et al* 2020)

Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolahan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Brebes Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh No.2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, salah satu diantaranya adalah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).Untuk melaksanakan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud tersebut terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pendapatan negara di dalam APBN yaitu sektor pajak. Pajak adalah kontributor terbesar dalam pendapatan negara, sekitar 80% lebih pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadikan penerimaan pajak sektor yang paling diandalkan oleh pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara.

Studi terdahulu dilakukan oleh Muibi *et al* (2013) yang meneliti pengaruh faktor ekonomi makro terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan analisis empiris dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan aktivitas ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan depresiasi nilai tukar dan tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Model jangka

pendek menunjukkan bahwa seluruh variabel seperti PDB, nilai tukar, tingkat inflasi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak, sedangkan variabel keterbukaan perdagangan dan hutang luar negeri tidak signifikan. Penelitian lain oleh Yuksel *et al* (2013) menyatakan bahwa: "Penerimaan pajak memiliki korelasi yang tinggi dengan Foreign Direct Investment, total cadangan, kredit domestik, ekspor, impor, nilai tukar, uang beredar dalam arti luas (M2), dan jumlah penduduk".

Masih besarnya tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Untuk itu, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Propinsi Jawa Tengah menggandeng PKK untuk melakukan sosialisasi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan di Pendopo Bupati Brebes. Kepala Bapenda Jateng Tavip Supriyanto menjelaskan, kerja sama dengan PKK sepanjang 2019 membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan pajak yang berhasil terbayar mencapai Rp 1,5 miliar pada2020 ini. Pihaknya memperluas kerja sama yang semula hanya enam kabupaten, ditambah 12 kabupaten/ kota lagi, di mana masing-masing daerah mendapat 2.000 lembar surat pemberitahuan pembayaraan pajak.

Bersadarkan tahun ini kami bekerja sama dengan 18 kabupaten. Kami akan mengevaluasi terus, mudah-mudahan hasil 2020 lebih baik," tandasnya. Sosialisasi yang diikuti 550 anggota PKK Kabupaten Brebes dan Tegal tersebut, di hadiri Ketua TP PKK Propinsi Jawa Tengah Ny Siti Atikoh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH, Wakil Bupati Brebes Narjo SH MH, Ketua TP PKK Kabupaten Brebes Ny Sri

legiastuti Narjo, Ketua Dekranasda Brebes Drs H Warsidin MH dan Ketua TP PKK Kabupaten Batang Uni Kuslantasih. Dilibatkannya Tim Penggerak PKK dalam sosialisasi tersebut sangat masuk akal, sebagai Organisasi yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat, PKK dianggap sangat cocok untuk membantu dalam urusan penyadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan. Untuk itu dalam acara tersebut seluruh anggota TP PKK di berikan penjelasan apa itu pajak kendaraan, apa saja manfaatnya dan program yang sedang dijalankan oleh Samsat se Jawa Tengah saat ini. Dengan harapan tentunya setelah pertemuan tersebut mereka akan dapat menjelaskan kepada Masyarakat.

Berdasarkan data yang ada untuk Kabupaten Brebes di Tahun 2020 saja Januari hingga Februari Setidaknya ada tunggakan 4,12 Milyar dari 16 ribu obyek pajak dimana untuk tunggakan diatas 1 tahun ada Rp 42,61 Milyar dari 114 ribu obyek (38.5%). Sementara untuk Kabupaten Tegal Januari hingga Februari 2020 sedikitnya ada tunggakan sebesar Rp 4,04 Milyar dari 14 ribu objek, dan tunggakan diatas satu tahun ada Rp 45,31 Milyar dari 115 obyek. Gubernur jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakinkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan seluruhnya untuk Pembangunan Daerah, terutama di daerah asal pajak itu diperoleh. Untuk itu jika pajak itu tidak dibayarkan maka tentunya pembangunan Infrastruktur juga akan tersendat. Selain mensosialisasikan kepatuhan pajak kendaraan dalam kesempatan tersebut juga digunakan Ganjar Pranowo untuk meminta masyarakat tetap tenang dalam menghadapi permasalahan Virus Corona yang sedang marak diberitakan. Ganjar meminta agar

masyarakat tidak perlu panik dan melakukan hal hal konyol seperti memborong barang barang kebutuhan pokok.

Senada dengan yang disampaikan suaminya , Ketua TP PKK Propinsi Jawa Tengah Ny Siti Atikoh Ganjar Pranowo juga mengajak seluruh Kader PKK agar terus melakukan pembinaan terhadap seluruh Masyarakat untuk dapat menjalankan hidup Sehat. Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes Ny. Sri Legiastuti Narjo mengatakan jajarannya akan selalu siap membantu mensukseskan program Pemerintah termasuk menggugah kesadaran Masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Atikoh Ganjar Pranowo mengakui, memang dibutuhkan kesabaran dan kesadaran dalam membantu pemerintah mengoptimalkan pajak kendaraan. Namun dia optimistis kader PKK memiliki mental kuat seperti itu. Terbukti, pada 2019 lalu saat kerja sama dengan Bapenda diujicobakan pada enam kabupaten, hasilnya cukup efektif. “Kader PKK itu grassroot yang langsung ke masyarakat. Jadi, ketika mereka mengampanyekan pembayaran pajak juga cukup efektif. Banyak kendala, tapi dengan pendekatan humanis, dengan bahasa yang baik, barrier bisa dihapus,”.

Samsat Brebes baru mampu menarik pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga pekan lalu sebesar Rp 108 miliar dari target perolehan sebesar Rp 127,5 miliar.Dengan kata lain, saat ini masih ada tunggakan pajak yang belum terbayar di Samsat Brebes sekitar Rp 19,5 miliar.Kasi Pajak Samsat Brebes, Tiara Rizkalia mengatakan, jumlah tunggakan Rp 19,5 miliar tersebut tidak hanya tunggakan pada 2019 ini saja melainkan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.Kami tetap

mengupayakan agar tunggakan tersebut dapat terbayar pada wajib pajak pemilik kendaraan," untuk mengejar para penunggak pajak kendaraan tersebut, pihaknya telah mengupayakan berbagai cara.Di antaranya membentuk tim Saber Pajak atau Satgas Tunggakan Pajak yang terdiri dari 12 orang. Mereka merupakan pihak ketiga yang dipekerjakan khusus menagih pajak kendaraan bermotor.

Setiap satu orang anggota Saber Pajak, ditargetkan mampu menagih 10 wajib pajak per harinya."Kita lakukan pendekatan dan sedikit paksaan, karena itu memang kewajiban. Kalau kendaraan sudah ganti pemilik, kita langsung lakukan pemblokiran," jelasnya.Cara lain, lanjutnya, yaitu dengan menggelar razia kendaraan bermotor bekerjasama dengan pihak kepolisian.Dalam razia itu, Samsat Brebes membuka pelayanan langsung untuk menjaring kendaraan yang menunggak pajak.Mesti sudah dilakukan berbagai upaya untuk menarik pajak kendaraan bermotor, berbagai kendala kerap dialami.Sehingga pajak kendaraan tetap tak terbayar.

Tabel 1.1

Research Gap

No	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Ajeng Dwi (2021)	a. Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. b. Jumlah penduduk, PDRB perkapita, inflasi dan sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2	Alvan Muhammad	a. Jumlah kendaraan bermotor dan jumlah

	(2020)	penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. b. Target dan realisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3	Prawita Raditya Nur (2018)	a. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKB. b. Jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKB. c. PDRB transportasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKB. d. PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PKB.
4	Yanti Febri *et al* (2014)	a. Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap PKB. b. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PKB. c. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap PKB.

Sumber : Berbagai Jurnal (2022)

Peneliti Ajeng Dwi *et al* (2021) di Kalimantan Selatan menghasilkan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Kalimantan Selatan adalah variabel jumlah kendaraan bermotor menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan. Peneliti Nur Prawita Radtya (2018) di DIY menunjukkan hasil bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadapa penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Peneliti Alvan Muhammad (2020) di Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan adalah variabel jumlah penduduk menunjukkan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Nur Prawita Radtya (2018) di DIY menunjukkan hasil bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Peneliti Febri Yuskar *et al* (2014) di Sumatera Barat menghasilkan variabel yang memiliki tidak pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Menurut Agustin Mery Maulydia (2017) menghasilkan variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor maupun pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meningkat maka penerimaan pajak pun meningkat.

Peneliti Febri Yuskar *et al* (2014) dan Ajeng Dwi *et al* (2021) secara simultan dan persial seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Model yang dibentuk dengan variabel bebas jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi.

Brebes memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Dengan banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi terus meningkat. Namun hal ini tidak diimbangi sarana transportasi umum yang memadai dengan ketersediaan sarana transportasi umum yang memadai sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan

pribadi. Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Brebes :

Tabel 1.2

Jumlah Kendaraan Bermotor di Brebes

NO	Tahun	Jumlah Kendaraan
1	2016	90,085
2	2017	99,238
3	2018	131,222
4	2019	173,991
5	2020	194.090

Sumber : Kantor UPPD Brebes

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kendaraan bermotor di Brebes semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun jumlah kendaraan bermotor telah bertambah. Jumlah kendaraan bermotor yang semakin tambah mempunyai dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor adalah timbulnya kemacetan dan populasi udara. Dampak positif dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor adalah dapat dijadikan potensi penerimaan pajak, semakin banyak jumlah kendaraan maka penerimaan pajak kendaraan bermotor juga diharapkan semakin meningkat. Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.3

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Brebes

No	Bulan	Realisi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jan	7,394,836,475	9,785,821,500	10,156,371,800	11,955,455,975	11,292,745,575
2	Feb	6,645,300,475	7,788,659,675	7,906,453,550	9,504,648,725	9,846,942,575
3	Mar	7,120,806,150	8,708,856,650	8,841,273,500	9,659,945,700	9,789,396,726
4	Apr	6,698,279,825	7,780,647,050	8,545,262,025	9,234,822,825	6,726,513,000
5	Mei	7,544,847,175	9,373,365,550	9,470,312,550	10,611,000,275	7,271,382,500
6	Jun	8,520,257,450	8,096,861,150	8,757,681,850	9,229,950,150	10,889,599,900

7	Jul	7,777,268,800	11,914,748,000	11,119,129,075	11,514,830,925	10,106,409,700
8	Agust	8,893,247,025	11,326,669,550	10,586, 900,300	11,183,498,475	9,583,480,375
9	Sep	8,645,123,625	10,970,404,350	10,447,297,775	11,151,391,175	9,231,382,000
10	Okt	9,217,416,975	11,445,835,675	11,917,788,900	11,588,290,225	9,369,059,000
11	Nov	9,215,587,250	11,100,936,850	11, 446,678,500	10,863,177,475	9,716,755,500
12	Des	10,980,849,675	10,827,975,775	13,348,778,950	12,689,358,000	10,900,212,750
TOTAL		**98,653,820,900**	**119,120,781,755**	**122,543,928,775**	**129,186,369,925**	**114,723,879,601**
Realisasi %		109.79	102.69	104.86	101.32	92.15

Sumber : Kantor UPPD Brebes

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dari target yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Dari 5 tahun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu melebihi target, hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah kendaraan penerimaan pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

Selain jumlah kendaraan bermotor, faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah jumlah penduduk. Penduduk atau warga masyarakat adalah konsumen yang akhirnya menikmati hasil produksi, tetapi sekaligus menjadi produsen atau pelaksanaan yang harus menjalankan dan mengorganisir seluruh proses produksi untuk membangun kesejahteraan hidupnya. Penduduk memerlukan sarana transportasi untuk memudahkan menjalani aktivitasnya, dengan adanya kendaraan bermotor maka keperluan masyarakat untuk bermobilisasi menjadi lebih cepat dan efisiensi. Jumlah penduduk di Brebes dalam tabel berikut :

Tabel 1.4

Jumlah penduduk di Brebes

NO	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2016	1.788.880
2	2017	1.796.004
3	2018	1.802.829
4	2019	1.808.975
5	2020	1.978.760

Sumber : Badan Pusat Statistik Brebes

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Brebes semakin bertambah, dalam kurun waktu 5 tahun penduduk di Brebes mengalami peningkatan yang sangatbesar(www.brebeskab.bps.go.id).Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan untuk sarana transportasi terus bertambah. Kenaikan jumlah penduduk diikuti dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor, kenaikan jumlah kendaraan bermotor diikuti dengan bertambahnya pertumbuhan ekonomi. Jumlah pertumbuhan ekonomi di Brebes dalam bentuk tabel.

Tabel 1.5

Pertumbuhan ekonomi

Tahun	Jumlah	%
2016	37.448.715,50	5,11 %
2017	39.963.111,45	6,65 %
2018	42.973.395,36	5,26 %
2019	46.178.657,58	-0,47%
2020	47.074.595,60	2,33%

Sumber : Badan Pusat Statistik Brebes

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa produktivitas suatu daerah semakin meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas maka daya beli masyarakat ikut naik pula (www.brebeskab.bps.go.id). Sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan

penting dalam menjalankan roda perekonomian dapat tercapai, hal ini ditunjang dengan kemudahan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor dengan uang muka ringan.

Hal itu di antaranya karena pemilik kendaraan memang tidak ada uang yang disebabkan perekonomian di Brebes sedang lesu."Ada juga masyarakat yang memang lupa membayar pajak.Selanjutnya kendaraan sudah dijual tapi tidak melaporkan ke Samsat sehingga tunggakan pajak masih ada," paparnya.Kendati demikian, Tiara optimistis angka tunggakan pajak tersebut mampu terpenuhi. Pasalnya, berkaca pada pengalaman 2018 lalu, dari target perolehan Rp 116 miliar justru mampu terpenuhi hingga Rp 122 miliar.Untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan, Samsat Brebes juga telah memperluas tempat pembayaran pajak kendaraan menjadi 8 titik pelayanan.Termasuk melakukan sosialisasi pembayaran pajak melalui aplikasi Sakpole yang bisa diakses melalui smartphone. Di aplikasi itu, wajib pajak hanya memasukkan nomor polisi kendaraan sehingga bisa diketahui berapa besar pajak yang harus dibayar. "Sedangkan untuk pembayarannya tetap di tempat-tempat yang sudah kami sediakan,"

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa jumlah penduduk suatu daerah semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka daya beli masyarakat ikut naik pula. Sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan penting dalam menjalankan roda perekonomian dapat tercapai, hal ini ditunjang dengan

kemudahan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor dengan uang muka ringan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu ingin peneliti melakukan penelitian berjudul "**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Brebes" (Studi Empiris UPPD Brebes Tahun 2016-2020).**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dalam penelitian iniyang dianalisis untuk dikaji lebih lanjut mengenai jumlah kendaraan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Masalah yang di identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Besarnya tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Brebes.
2. Berdasarkan data yang ada untuk Kabupaten Brebes di Tahun 2020 saja Januari hingga Februari Setidaknya ada tunggakan 38,5%.
3. Realisasi penerimaan pajak Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadikan penerimaan pajak sektor yang paling diandalkan oleh pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara.
4. Pemerintah melakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

5. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah melaui optimalisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan Identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Batasan masalah dilakukan terkait dengan kepentingan dan kelayakan dalam penelitian serta keterbatasan waktu, sehingga batasaan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti memfokuskan peneliti pada jumlah kendaraan bermotor,jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Brebes.
2. Data yang diamati yaitu data jumlah kendaraanbermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode Tahun 2016 – 2020.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah kendaraan bermotor berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor?

1.5. Tujuan Masalah

Beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan memahami pentingnya membayar pajak kepada negara demi kesejahteraan rakyat.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi peran pajak terhadap pendapatan pemerintah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dipergunakan sebagai rujukan serta memberikan tambahan konseptual bagi kesamaan dalam penelitian ataupun perguruan tinggi lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk pembaharuan pada pendidikan.

d. Bagi perguruan tinggi

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber atau bahan rujukan untuk mahasiswa akhir selanjutnya di Universitas Muhadi Setiabudi khususnya prodi akuntansi.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 LandasanTeori

2.1.1 Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) menjelaskan bahwasanya “Negara mempunyai hak mutlak agar memungut pajak daari masyarakatnya”. Disadari masyarakat bahwa “Membayar Pajak adalah sebuah keharusan sebagai tanda baktinya pada negara agar pemerintahan negara berjalan baik & lancar”. Berdasarkan teori tesebut dasar aturan pajak terdapat pada hubungan antar rakyat dan negara, yaitunegara mempunyai hak memungut pajak sedangkan rakyat berkewajiban membayar pajak.

Hubungan teori mutlak atau bakti ini yaitu kendaraan bermotor yang dibeli seorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat di kembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat. Teori ini adalah oleh karena pajak digunakan untuk kepentingan umum maka baik mereka yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak memperoleh manfaat dari padanya. Jadi bukan dari satu pihak dibayar untuk pihak lain, dimana membayar tidak mendapatkan apa-apa. Dalam pajak membayar pajak juga ikut menikmati hasilnya. Salah satu kewajiban warna negara adalah membayar pajak termasuk pajak kendaraan bermotor.

Teori ini mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi dari masyarakat/penduduk maka timbul hak berbakti untuk memungut pajak. Sekumpulan masyarakat/penduduk tersebut membuat perjanjian untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memipin masyarakat/penduduk. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat/penduduk harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Sehingga menurut teori ini negara berhak memungut pajak dan rakyat/penduduk berkewajiban membayar pajak.

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak ada pada jasa yang diberikan negara kepada rakyat, yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk itu,diperlukan biaya-biaya yang harus mutlak oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut yaitu dalam bentuk pajak. Semakin besar berbakti, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, wajar jika biaya yang dikeluarkan negara dibebankan kepada masyarakat.

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, warga negara yang lalai dalam membayar pajak dianggap kurang atau tidak berbakti kepada negaranya. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, didasarkan *official assesment* dimana jumlah pajak yang harus dibayarkan telah ditentukan oleh fiskus. Teori mutlak/bakti ini menjelaskan bahwa semakin banyak kepemilikan kendaraan seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula pajak yang harus

dikeluarkan. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak termasuk pajak kendaraan bermotor. Mayarakat yang memiliki kepemilikan kendaraan bermotor harus berkonsekuensi membayar pajak, karena merupakan kewajiban kepada negara. Apabila melanggar kewajibannya maka wajib pajak dikatakan tidak mencintai negaranya sendiri.

2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah pada tahun 2012, dimana dilakukan implementasi yang berbasiskan *International Financial Accounting Standard* (IFRS) di Indonesia. PSAK tentunya untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih mudah dalam memahami laporan keuangan tersebut. Pengguna yang dimaksud, adalah perorangan serta organisasi yang membutuhkan.Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dibagi menjadi 5 macam yaitu:

1. PSAK-IFRS

IFRS merupakan sebuah standar keuangan yang digunakan internasional. PSAK-IFRS merupakan standar akuntansi yang pertama kali berlaku di Indonesia dan dipraktikkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2012. Bagi badan usaha yang akuntabilitasnya publik biasanya menggunakan PSAK-IFRS. Berarti, badan usaha tersebut sudah terdaftar di pasar modal atau mungkin sedang mengajukan pendaftaran di pasar modal sebagai emiten. Contoh badan usaha yang menggunakan PSAK-IFRS ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan dana pensiun.

2. PSAK-ETAP

ETAP merupakan singkatan dari Entitas Tanpa Asuransi Publik. PSAK-ETAP disebut juga sebagai SAK-ETAP yang merupakan penyederhanaan dari PSAK-IFRS. Dalam SAK-ETAP, tidak dilakukan pencatatan laporan laba rugi guna mempermudah pengguna dalam melakukan analisis. Aset tak berwujud, aset tetap, dan juga properti investasi pasca tanggal perolehan menggunakan harga perolehan untuk menentukan nilainya. SAK-ETAP paling tepat digunakan unit bisnis menengah atau kecil karena bisa membantu pemilik bisnis menyusun laporannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lainnya.

3. PSAK-Syariah

Seperti namanya, PSAK-Syariah digunakan untuk lembaga yang memiliki kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya. Dan seperti namanya, yang menetapkan PSAK-Syariah adalah Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI). Penyusunan dengan PSAK-Syariah dilakukan secara konsptual tapi dalam implementasinya bisa menggunakan PSAK umum jika dibutuhkan. Contohnya seperti bank Syariah yang akuntabilitasnya publik, sehingga harus menyusun laporannya dengan PSAK umum lalu mengaut SAK-Syariah untuk transaksi di dalamnya yang berbasis Syariah.

4. SAK-EMKM

Standar yang satu ini digunakan untuk kebutuhan laporan keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah mengacu pada UU 20/2008 terkait

UMKM atau Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. SAK-EMKM biasanya digunakan oleh entitas yang masih belum bisa menerapkan SAK-ETAP.

5. SAP

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, seperti namanya ditujukan untuk entitas pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Pada saat membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedomannya. SAP ditetapkan dalam PP 24/2005 dan bertujuan agar lembaga pemerintah juga berpartisipasi, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara.

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Prawita, 2018). Waluyo (2007) menyebutkan pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayain pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 aya (1), yaitu: “Atas permohonan wajib pajak,

kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan bahwa apabila ternyata wajib pajak mempunyai uatang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan Negara dan masyarakat. Manurut (Prawita, 2018) fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

   Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (pengaturan)

   Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidan sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Selain itu, fungsi pajak Menurut (Prawita, 2018)ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan *(Budgeteir)*

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkanya pajak dalam APBN aebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatuur *(Reguler)*

   Pajak berfungsi sebagai alat untu mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak

yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.5 Jenis Penggolongan Pajak

Pajak menurut (Prawita, 2018)dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak langsung (jadi langsung dikenakan pada subjeknya). Dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat syarat objektifnya. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subyeknya. Dimulai dengan objeknya, seperti kendaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Pembebanannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). Contoh: PPh, PBB.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang langsung dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajakini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.

3. Menurut kewenangannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan (APBN). Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013), terdapat 3 macam sistem pemungutan pajak, yakni sebagai berikut:

1. *Official AssessmentSystem*

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus), Wajib Pajak (WP) Bersifat pasif dan Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2. *Self AssessmentSystem*

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP)sendiri dan Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanyamengawasi.

3. *WithholdingSystem*

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menetukan

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak(WP).

2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Undang-undang No.10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/ Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30%, sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Subjek PKB adalah orang pribadi, badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah,TNI, dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti

kepemilikan atau dokumen sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti pengasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.

2. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.

3. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau yangditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan.

Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepentingan dan/penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti buildozer, excavator, loader, dan lain-lain, yang tidak digunakan sebagai alat angkut orang dan/atau barang dijalan umum.

Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertangung jawab terhadap pelunasan. Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tagggal pendaftaran. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu hal dan hal lain masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung dari perkalian dua unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga penetapan pajak kendaraan bermotor adalah :

1,5% X bobot X Nilai Jual Kendaraan

Perda 8 Tahun 2010 serta perda No. 2 tahun 2015

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

1. Sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;

2. Sebesar 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;

3. Sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota);

4. Sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak.

2. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang disamakan.

3. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurag Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

4. Terhadap Wajib Pajak Tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar Pemungutan dan Penyetoran Pajak.

2.1.8 Jumlah Penduduk

BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menerangkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk yang berada atau tinggal dalam suatu daerah harus mengikuti peraturan daerah tersebut termasuk dalam hal peraturan pembayaran pajak yang digunakan untuk menopang pembangunan daerah mereka tinggal. Data jumlah penduduk diukur dalam satuan orang.

Sensus Penduduk tahun 2010, BPS melakukan pencacahan penduduk menggunakan konsep *"de jure"* atau konsep "dimana seseorang biasanya menetap/bertempat tinggal" (*usual residence*) dan konsep *"de facto"* atau

konsep “dimana seseorang berada pada saat pencacahan”. Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap (BPS, 2010).

Penduduk berperan dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Halim mengatakan bahwa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar *(ability to pay)* berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

2.1.9 Jumlah Kendaraan Bermotor

Undang-Undang No.30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) mendefinisikan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis- jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam,

mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. Data jumlah kendaraan bermotor diukur dalam satuan unit.

2.1.10 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya. Komponen yang digunakan untuk mengukur perumbuhan ekonomi adalah Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam buku Ekonomi Makro (2012) karya Joko Untoro disebutkan, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut buku makro ekonomi: Teori pengantar (2012) karya Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinabungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

2.2 PenelitiTerdahulu

a. Penelitian oleh Ajeng Dwi *et al* (2021) dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimatan Selatan". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jumlah penduduk, jumlah kendaraan, produk domestik bruto regional perkapita, inflasi dan sistem pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi kalimantan selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengakan jumlah penduduk, produk domestik bruto regional perkapita, inflasidan sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi kalimatan selatan.

b. Penelitian oleh Alvan Muhammad (2020) dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi sumatera utara. Hasil penelitian ini yaitu mengetahui landasan hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor, tata cara pemungutan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta mengetahui gambaran jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk di provinsi sumatera utara.

c. Penelitian oleh Kartika Lia (2020) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi adalah jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sektor Transportasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara parsial hasil analisis menunjukka bahwa jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan PDRB sektor transportasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Penelitian oleh Oktorolu Imanda Ryansah (2019) dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inflasi, jumlah kendaraan bermotor,jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

e. Penelitian oleh Nur Radiktya Prawita (2018) dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, PDRB transportasi dan PDRB perkapita terhadap

pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan variable jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB, jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB, PDRB transportasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB, sementara PDRB perkapita berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan PKB.

f. Penelitian oleh Tri Rina (2018) dengan judul "Analisis Kebijakan *Earmarked Tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah". Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pajak kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor, dan *earmarked tax* terhadapa pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dengan *earmarked tax,* jumlah kendaraan bermotor dengan *earmarked tax* memiliki korelasi sangat kuat. Sedangkan, pajak kendaraan bermotor dengan pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan), jumlah kendaraan bermotor dengan pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan), *earmarked tax* dengan pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan) memiliki korelasi cukup kuat.

g. Penelitian oleh Lulus *et al* (2018) dengan judul *" Motor Vehicle Tax Compliance Levels: An Empirical Study And The Determining Factors". The aim of this study is to analyze the effect of the application of administrative penalty, awareness of taxpayers, interest rates on tax penalties, and tax payment procedure on the level of taxpayer compliance. Based on the results of the study it*

is known that the significance value is 0,000 <0, 05 so, the fourth hypothesis is accepted. This means that there is an effect of tax payment procedures on motor vehicle taxpayer compliance. The higher the tax payment procedure will increase taxpayer compliance. Thus , there is an influence between the procedure for paying taxes on taxpayer compliance

h. Penelitian oleh Indra Dede (2015) dengan judul "Aanalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Nagan Raya". Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, hambatan dan kesulitan di lapangan dalam proses pengutipan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah terendah tahun 2012 sebesar 1.69% termasuk dalam kategori sangat kurang atau rendah. Dengan demikian atau manfaat yang diberikan oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2008-2012 masih rendah. Akan tetapi Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor saja, karena masih terdapat penerimaan pendapatan lainnya yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

i. Penelitian oleh Febri Yuskar *et al* (2014) dengan judul "Analisi Efektivitas dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat". Tujuan penelitain ini adalah untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini adalah penerimaan

pajak kendaraan bermotor sudah efektif si sumatera barat, jumlah kendaraan bermotor, julah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat ditampilkan secara tabel untuk membandingkannya. Berikut adalah tabel perbandingan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Populasi & Sampel	Variabel	Alat	Hasil
Ajeng Dwi *et al* (2021)	Analisi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan	Pajak kendaraan bermotor, waktu 3 bulan yaitu oktober-desember 2020. Data primer wawancara 5 0rang dengan teknik purposive sampling. Data sekunder Badan Keuangan Daerah penerimaan pajak kendaraan bermotor di 13	Variabel Dependen : penerimaan pajak kendaraan bermotor. Variabel Independen : jumlah penduduk, jumlah kendaraan, produk domestik bruto regional (PDRB) perkapita, inflasi	SPSS	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kendaraan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. 2. Sedangkan jumlah penduduk, PDRB Perkapita,

		kabupaten/kota	dan sistem pajak.		inflasi, dan sistem pajak tidak signifikan.
Alvan Muhammad (2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Laporan dari instansi yaitu badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) provinsi sumatera utara dan beberapa website.	Variabel Dependen : Penerimaan pajak kendaraan bermotor. Variabel Independen : jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor.	SPSS	1. Hasil penelitian bahwa jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif. 2. Hasil target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di badan pengelola pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif. 3. Penerimaan pajak

					kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh positif.
Kartika Lia (2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.	Bapenda dan BPS menggunakan data time series tahun 2010-2018.	Variabel Dependen: Penerimaan PKB. Variabel Independen: Jumlah kendaraan bermotor, Jumlah penduduk, PDRB sektor transportasi.	SPSS	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan PDRB sektor transportasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB.
Oktorolu Imanda Ryansah (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Populasi: dalam penelitian ini adalah 15 buah data time series untuk masing-masing variabel (15 tahun). Sampel: jenuh atau sensus, dimana populasi dalam penelitian	Variabel Dependen : penerimaan pajak kendaraan bermotor. Variabel Independen: inflasi, jumlah kendaraan	SPSS	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan PDRB secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap PKB.

		digunakan sebagai sampel". Maka sampel penelitian sama dengan populasi yaitu sejumlah 15 buah data time series periode tahun 2003-2017 untuk masing-masing variabel.	bermotor, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto (PDRB).		
Nur Prawita Radtya (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta	Metode kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari buku dan jurnal dan metode basis data dengan menelusuri sumber data secara langsung dan mengakses data dari website resmi pemerintah daerah.	Variabel Dependen : pajak kendaraan bermotor. Variabel Independen : jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, PDRB transportasi dan PDRB perkapita.	SPSS	1. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKB. 2. Jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKB. 3. PDRB transportasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKB. 4. PDRB per

					kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PKB.
Rina *et al* (2018)	Analisis Kebijakan Earmarked Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan) di Provinsi Jawa Tengah.	Data yang digunakan terdiri dari 35 Kabupaten/Kota pada tahun 2014-2015.	Variabel Dependen : pelayanan publik. Variabel Independen : pajak kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor. Variabel intervening : earmarked tax.	SPSS	1. Pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap earmarked tax baik secara individu maupun bersama-sama. 2. Pajak kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor dan *earmarked tax* memiliki pengaruh langsung secara

					signifikan terhadap pelayanan publik (pembangunan dan pemiliharaan jalan).
Lulus Rr *et al* (2018)	*Motor Vehicle Tax Compliance Levels: An Empirical Study and The Determining Factors*	*The population: of this study was the motor vehicles taxpayer at SAMSAT I Semarang. Sample of this study was the motor vehicle tax payer at SAMSAT I Semarang, we use accidental sampling method to determine the number of sample based on coincidence, and that is, anyone who accidentally meets with a writer can join*	*Dependent Variabel: taxpayer compliance (Y).* *Independent Variabel: administrative penalty, awareness of taxpayers, interest rates on taxation penalty, tax payment procedures.*	*SPSS*	1. *Based on the results of the study it is known that the significance value is 0,000 <0, 05 so, the fourth hypothesis is accepted. This means that there is an effect of tax payment procedures on motor vehicle taxpayer compliance. The higher the tax payment procedure will increase taxpayer compliance.* 2. *Thus , there is an influence*

		the study. The sample in this study was taken by distributing questionnaires to 200 respondents. The questionnaires that returned without being filled were 32 questionnaires. While the questionnaire filled out by respondents, but not complete is 24 questionnaires, then the returned and can be processed questionnaires is only 144 questionnaires.			*between the procedure for paying taxes on taxpayer compliance.*
Indra Dede (2015)	Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan	Data dari SAMSAT Naga Raya tentang data laporan penerimaan Pajak	Variabel Dependen : pajak asli daerah.	SPSS	Hasil dari penelitian ini menunjukka bahwa pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah tidak signifikan atau

	Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Naga Raya.	Kendaraan Bermotor tahun 2008-2012.	Variabel Independen: pajak kendaraan bermotor.		tidak efektif.
Febri Yuskar *et al* (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat	Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Sumbar tahun 2007-2011.	Variabel Dependen: penerimaan PKB. Variabel Independen: jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.	SPSS	1. Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap PKB. 2. Jumlah penduduk berpengaruh sugnifikan terhadap PKB. 3. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap PKB.

Sumber : Berbagai jurnal (2022)

2.3 KerangkaPemikiran

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

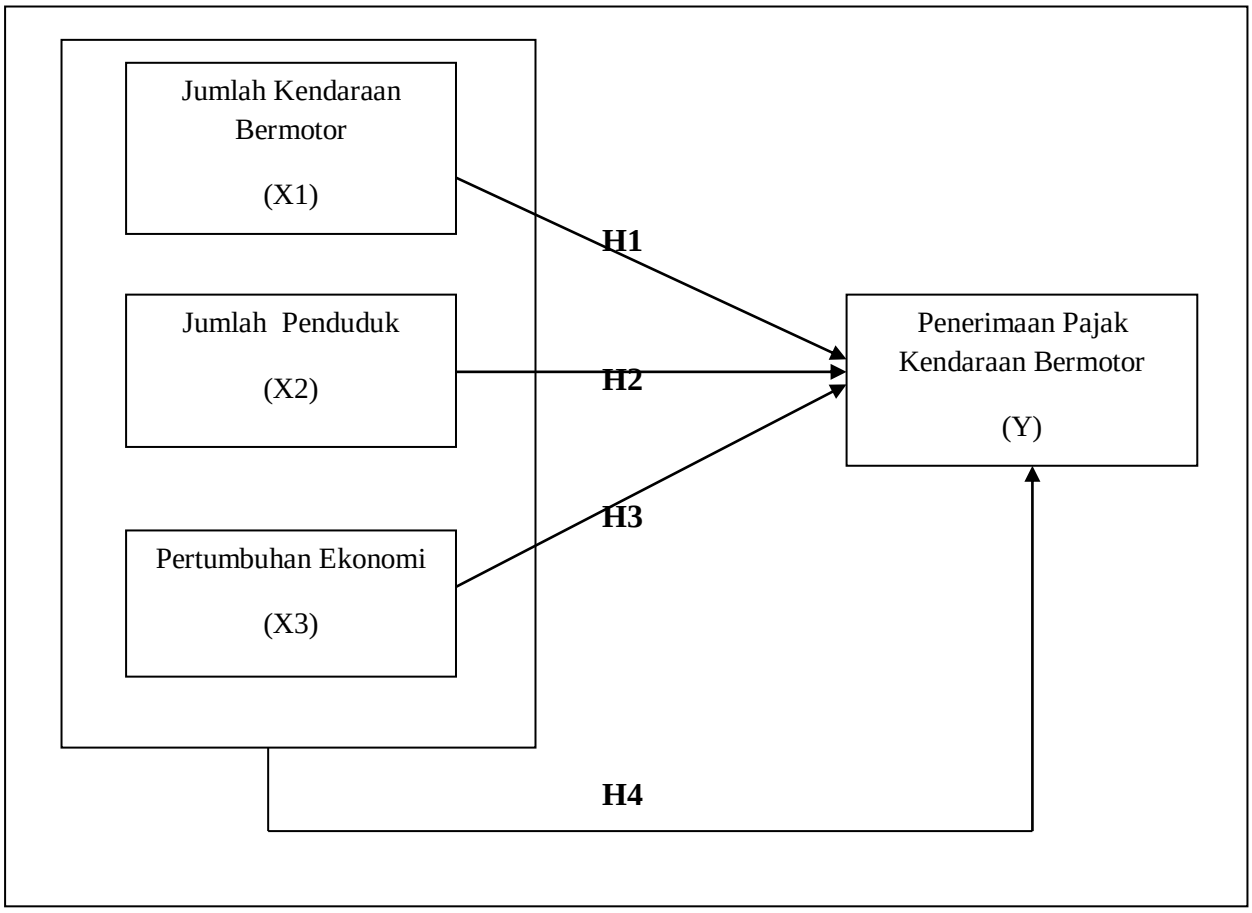

Keterangan :

X1 : Jumlah Kendaraan Bermotor

X2 : Jumlah Penduduk

X3 : Pertumbuhan Ekonomi

Y : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor merupakan seluruh kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang dapat digunakan di semua jenis jalan darat, dan jelas digerakkan menggunakan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang memiliki fungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi sumber tenaga gerak di kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda atau motor dan tidak melekat secara permanen, begitu juga dengan kendaraan bermotor yang pengoperasiannya di air.

Kendaraan bermotor mempunyai keterkaitan dengan teori mutlak/bakti yaitu salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak termasuk pajak kendaraan bermotor. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor harus berkonsekuensi membayar pajak karena merupakan kewajiban kepada negara. Oleh karena itu, warga negara yang lalai dalam membayar pajak dianggap kurang atau tidak berbakti kepada negaranya.

Jumlah kendaraan bermotor akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara langsung. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Alvan Muhammad (2020) melakukan penelitian mengenai jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak

kendaraan bermotor. Bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kemudian menurut Oktorolu Ryansah Imanda (2019) mengatakan bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Adanya pengaruh positif dan signifikan antara jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2.4.2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penduduk berperan dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Halim mengatakan bahwa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar *(ability to pay)* berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

Penduduk mempunyai ketrkaitan dengan teori mutlak/bakti bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, oleh karena itu penduduk terikat pada keberadaan negara dan karenanya wajib membayar pajak, dalam arti wajib berbakti kepada negaranya, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak.

Penduduk di Brebes mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor. Seiring dengan perkembangan teknologi, penduduk membutuhkan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk melaksanakan aktivitasnya. Semakin besar laju pertumbuhan penduduk ada kemungkinan menambah penerimaan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan bermotor, terutama penduduk yang berkecukupan dan sejahtera. Menggunakan kendaraan bermotor akan mempermudah penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain itu, kendaraan bermotor yang ditawarkan juga beragam sesuai dengan penghasilan penduduk. Nur Prawita Radtya (2018) melakuka penelitian mengenai jumlah penduduk. bahwa jumlah penduduk positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kemudian Yanti Feberi *et al* (2014) mengatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H2 : Adanya pengaruh positif dan signifikan antara jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2.4.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa jumlah penduduk suatu daerah semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka daya beli masyarakat ikut naik pula. Sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan penting dalam menjalankan roda perekonomian dapat tercapai, hal ini ditunjang dengan

kemudahan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor dengan uang muka ringan.

Pertumbuhan ekonomi mempunyai keterkaitan dengan teori mutlak/bakti bahwa dasar keadilan pemungutan pajak ada pada jasa yang diberikan negara untuk rakyat yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, jika jasa yang diproduksi semakin meningkat maka pemungutan pajak semakin tinggi, oleh karena itu warga negara yang berbakti harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban masyarakat kepada negaranya.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan jumlah penduduk,dimana pertumbuhan jumlah penduduk dapat berpengaruh positif ataupun negatif. Pertumbuhan penduduk potensial yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Triani Utami (2014). Peneliti menyatakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di brebes akan mendorong pertumbuhan tingkat produktifitas penduduk yang potensialini yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di brebes sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Menurut Agustin Mery Maulydia (2017) menyatakan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya

meningkat maka penerimaan pajak pun meningkat.Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H3 : Adanya pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2.4.4. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor merupakan seluruh kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang dapat digunakan di semua jenis jalan darat, dan jelas digerakkan menggunakan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang memiliki fungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi sumber tenaga gerak di kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda atau motor dan tidak melekat secara permanen, begitu juga dengan kendaraan bermotor yang pengoperasiannya di air.

Kendaraan bermotor mempunyai keterkaitan dengan teori mutlak/bakti yaitu salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak termasuk pajak kendaraan bermotor. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor harus berkonsekuensi membayar pajak karena merupakan kewajiban kepada negara. Oleh karena itu, warga negara yang lalai dalam membayar pajak dianggap kurang atau tidak berbakti kepada negaranya.

Penduduk berperan dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi. Halim mengatakan bahwa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar *(ability to pay)* berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Penduduk mempunyai ketrkaitan dengan teori mutlak/bakti bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, oleh karena itu penduduk terikat pada keberadaan negara dan karenanya wajib membayar pajak, dalam arti wajib berbakti kepada negaranya, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa jumlah penduduk suatu daerah semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka daya beli masyarakat ikut naik pula. Sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan penting dalam menjalankan roda perekonomian dapat tercapai, hal ini ditunjang dengan kemudahan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor dengan uang muka ringan. Pertumbuhan ekonomi mempunyai keterkaitan dengan teori mutlak/bakti bahwa dasar keadilan pemungutan pajak ada pada jasa yang diberikan negara untuk rakyat yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, jika jasa yang diproduksi semakin meningkat maka pemungutan pajak semakin tinggi, oleh karena itu warga negara yang berbakti harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban masyarakat kepada negaranya.

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hungungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Dalam penerimaan

pajak kendaraan bermotor jumlah pajak yang harus dibayarkan telah ditentukan. Teori mutlak/bakti ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah kepemilikan kendaraan semakin tinggi pula pajak yang harus dikeluarkan.

Penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu yang dilakukan Alvan Muhammad (2020) menyatakan jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kemudian peneliti mengatakan jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kemudian menurut Oktorolu Raditya Imanda (2018) jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, hipotesis diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : Adanya pengaruh signifikan dan simultan antara jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan di Wilayah Brebes Tahun 2016-2020", Penelitian ini mengkaji di UPPD Brebes. Periode yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2016-2020, dan data penelitian diambil di Kantor UPPD Brebes. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2022.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) yang dikatakan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja dapat berupa atribut, sifat atau nilai dari orang serta dapat berupa objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

3.2.1 Variabel Penelitian

1. *Dependent Variable* (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah variabel penelitian yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel lain yang dinamakan variabel independen. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel dependen disebut juga variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor di beri simbol (Y). Penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam penelitian.

2. *Independent Variable* (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah variabel penelitian yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel lain yang dinamakan variabel dependen. Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent*. Variabel independen disebut juga variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan jumlah kendaraan bermotor yang diberi simbol X1, jumlah penduduk yang diberi simbol X2, dan pertumbuhan ekonomi diberi simbol X3.

3.2.2 Definisi Operasional Penelitian

1. Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah angka yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai angka yang harus dicapai oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu tahun tertentu dalam satuan nilai rupiah.
2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah angka yang didapat setelah dilakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap wajib pajak selama tahun anggaran tertentu dalam satuan nilai rupiah.

3. Jumlah Kendaraan Bermotor adalah banyaknya Kendaraan Bermotor yang terdapat pada suatu wilayah yang diukur dalam satuan unit Kendaraan bermotor.
4. Jumlah Penduduk adalah banyaknya penduduk yang terdapat pada suatu daerah yang diukur dalam satuan jiwa per tahun.
5. Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah.

Untuk dapat mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen serta peran variabel terhadap perubahan penerimaan pajak kendaraan bermotor dilakukan teknik analisis regresi linier berganda. Efektivitas pajak digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber kemendagri No. 690.900-327

Tingkat efektifitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rasio Efektivitas Pajak

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber tim litbang depdagri – kemendagri No. 690.900.327

3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berguna meniliti sebuah populasi atau sampel tertentu dimana data yang akan digunakan diteliti dalam bentuk angka-angka melalui alat uji perhitungan statistik. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak kedua, artinya data penelitian ini diperoleh serta dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016-2020.

Metode pengumpulan data menggunakan metode *nonprobability sampling method* yaitu metode pengambilan sampel yang memberikan setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk pengambilan sampel. Alat pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi analisis data statistik atau disebut

dengan *Statistical Package For Sosial Science (SPSS)*. Program SPSS ini menggunakan SPSS versi 25.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini disajikan dalam adalah laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdapat di kantor UPPD Brebes tahun 2016-2020.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel (*nonprobability sampling*) yang memberi setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk pengambilan sampel. Artinya, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh, dimana sampel diambil dari keseluruhan anggota populasi. Dengan demikian, sampel penelitian ini adalah keseluruhan laporan jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2016-2020 sebesar 60 sampel. Data tersebut merupakan data perbulan periode 2016-2020.

3.5 Metode Analisi Data

Menurut Sugiyono (2017) bahwa metode analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data dapat berupa pengelompokkan data berdasarkan variabel dan

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dalam bentuk tabulasi sehingga memudahkan peneliti menginterpretasikan data dan memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian yang utama. Statistik deskriptif memberi gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi,varian, maksimum, sum, range,kurtosis dan *skewness* (kemencangan distribusi).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Dan jika variabel tidak terdistribusi secara normal (ketidakmetrisan kekanan atau kekiri) maka hasil uji statistik akan tergradasi. Uji

normalitas ini dilakukan dengan menggunkan grafik normal probability plot dimana dilakukan perbandingan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dalam uji normalitas ini dilakukan pula *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05. Berikut ini dasar pengambilan keputusan:

(a) Hipotesis Nol (Ho) : Data berdistribusi normal, bila *Asymp.* Sig. (2-*tailed*) > 0,05

(b) Hipotesis Alternatif (HA) : Data tidak berdistribusi normal, bila *Asymp*. Sig. (2-*tailed*) < 0,05 .

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018).

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Metode yang dapat digunakan untuk menguji terjadinya multikoloniearitas dapat dilihat dari matrik korelasivariabel Menurut Ghozali (2018).Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF-nya (*Variance Inflation Factor*). Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas dalam penelitian ini jika nilai Tolerance lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10,00 maka data tidak terkena multikolinearitas diantara variabel independennya (Ghozali, 2018).

3.5.3 Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. . Jika *variance* dari *residual* satu pegamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar analisis yang digunakan untuk menetukan heterokedastisitas adalah jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka tekah terjadi heterokedastistas, Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2018).

3.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul kaena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji Durbin – Watson (DW Test). Ada beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, diantaranya melalui uji Durbin Watson (DW Test). Tingkat signifikansi yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebesar 5%. Menurut Ghozali (2018)pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

1) Jika nilai 0 < dw< dl berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan ditolak.

2) Jika nilai dl ≤ dw ≤ du berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan *no decision*.
3) Jika nilai 4 – dl < dw< 4 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi negatif dengan keputusan ditolak.
4) Jika nilai 4 – du ≤ dw ≤ 4 – dl berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi negatif dengan keputusan *no decision*.
5) Jika nilai du < dw< 4 – du berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi positif atau negatif dengan keputusan tidak ditolak.

3.5.5 Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil biasa atau *Ordinary Least Square* (OLS). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh Jumlah

kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Persamaan regresi yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$$

Dimana:

Y = Variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

α = Konstanta

β1,β2,β3= Koefisien Regresi dari variabel independen

X1 = Variabel Jumlah Kendaraan Bermotor

X2 = Variabel Jumlah Penduduk

X3 = Variabel Pertumbuhan Ekonomi

e = residual/error (Variabel diluar penelitian)

3.5.6 Uji Hipotesis

3.5.6.1 Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2018) uji t pada dasarnya menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

(a) Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

(b) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.6.2 Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji *goodness of fit*atau uji F digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Uji kelayakan model ini juga dikenal dengan uji F. Uji F pada hakikatnya mengukur efektifitas model atau mengukur berapa persen variasi Y yang bisa dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang digunakan, dalam penelitian ini toleransi kesalahan dengan kriteria pengujian tingkat signifikan $\alpha = 0,05$. Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model atau *goodness of fit*, apakah model persamaan yang terbentuk masuk dalam kriteria cocok (*fit*) atau tidak. Ghozali (2018) kriteria pengambilan keputusan uji F yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan statistik F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai F lebih besar daripada 0,05 atau 5% maka H0 dapat ditolak. Dengan kata lain Ha diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima.

3.5.7 Koefisien determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen" Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2018). Untuk memprediksi variasi variabel dependen agar dapat memberikan semua informasi nilai harus mendekati satu pada variabel independen. Artinya setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 pasti cenderung meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.

R^2 = 0 (nol) berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

R^2 = meendekati 0 (nol) lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

R^2 = mendekati 1 (satu) berarti kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes terletak antara 6º 44' – 7º 21' Lintang Selatan dan antara 108º 41' – 109º 11' Bujur Timur. Luas wilayah administrasi tercatat sebesar 166.296 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.500 Ha atau 17,65 % dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan.Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kersana, luas wilayahnya sebesar 2.523 Ha atau 2,17% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam 17 Kecamatan yang terdiri dari 292 desa dan 5 kelurahan, 1.132 Dusun, 1.608 Rukun Warga (RW) / Lingkungan dan 8.274 Rukun Tetangga (RT).Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak diJawa Tengah.

4.1.2 Gambaran Umum UPPD Brebes

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Brebes bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjang pajak STNK atau kendaraan bermotor. Kantor UPPD Brebes berada di daerah Gandasuli lebih tepatnya di Jl. Gajah Mada No. 60, Pecolotan - Gandasuli,

Kec. Brebes Kab. Brebes Jawa Tengah kode pos 52215. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat layanan samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi e-samsat. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek pajak kendadaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajar motor dan mobil, cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tarif perpanjangan pajak motor dan mobil dan lainnya.

4.1.3 Visi dan Misi Kantor UPPD Brebes

1.) Visi :

" Menjadi institusi penghimpunan pendapatan daerah yang profesional"

2.) Misi :

1. Menghimpun pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan dan kemandirian daerah.
2. Mengembangkan pelayanan pendapatan daerah yang inovatif didukung dengan penerapan tehnologi informasi serta aparatur yang berintegritas, kompeten, dan akuntabel.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Deskriptif

Metode deskriptif ini yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dalam bentuk tabulasi sehingga memudahkan peneliti menginterpretasikan data dan memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian yang utama. Statistik deskriptif memberi gambaran atau deskripsi suatu

data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi,varian, maksimum, sum, range,kurtosis dan *skewness* (kemencangan distribusi).

Tabel 4.1

Hasil Uji Deskriptifstatistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JumlahKendaraan	60	90,085	194,090	139,459	41,200
JumlahPenduduk	60	1,788,880	1,978,760	1,838,254	74,814
PertumbuhanEkonomi	60	-0.470	6.650	3.730	2.566
PPKB	60	6,645,300,475	13,348,778,950	9,737,146,350	1,593,844,397
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa total data yang digunakan adalah sebanyak 60 data sebagai berikut:

1. Jumlah Kendaraan Bermotor

   Variabel ini merupakan perhitungan jumlah kendaraan bermotor dari kabupaten Brebes tahun 2016-2020. Dari data yang didapat, dapat dilihat bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor memiliki nilai terendah sebesar 90085 tahun 2016, dan memiliki nilai tertinggi sebesar 194090 tahun2020. Secara keseluruhan variabel Jumlah Kendaraan Bermotor memiliki nilai rata-rata sebesar 139459, dan standar deviasi sebesar 41200.

2. Jumlah Penduduk

   Variabel ini merupakan perhitungan jumlah penduduk dari kabupaten Brebes tahun 2016-2020. Dari data yang didapat, dapat dilihat bahwa Jumlah Penduduk memiliki nilai terendah sebesar 1788880 tahun 2016, dan memiliki

nilai tertinggi sebesar 1978760 pada tahun 2020. Secara keseluruhan variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai rata-rata sebesar 1838254, dan standar deviasi sebesar 74814.

3. Pertumbuhan Ekonomi

   Dari data yang didapat, dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai terendah sebesar -0.470 % tahun 2019, dan memiliki nilai tertinggi sebesar 6,65% pada tahun 2017. Secara keseluruhan variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,73%, dan standar deviasi sebesar 2,566.

4. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

   Dari data yang didapat, dapat dilihat bahwa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai terendah sebesar 6645300475 tahun 2016, dan memiliki nilai tertinggi sebesar 13348778950 tahun 2018. Secara keseluruhan variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai rata-rata sebesar 9737146349,6, dan standar deviasi sebesar 1593844397,23.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik *kolmogorov-smirnov*. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandariz ed Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,000
	Std. Deviation	0,313
Most Extreme Differences	Absolute	0,090
	Positive	0,090
	Negative	-0,059
Test Statistic		**0,090**
Asymp. Sig. (2-tailed)		**.200[c,d]**

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji normalitas kedua*Kolmogorov-Smirnov*, didapat hasil nilai Sig. Dengan demikian hasil uji *Kolomogorov-Smirnov* dari keempat variabel diatas telah memenuhi syarat normalitas dengan nilai Sig. > α = 0,05. Hal ini, bisa disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi data yang normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF-nya (*VarianceInflation Factor*). Regresi bebas

dari masalah Multikolinieritas dalam penelitian ini jika nilai Tolerance lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10,00 maka data tidak terkena multikolinearitas diantara variabel independennya.

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinearitas Data

Coefficients[a]			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah Kendaraan Bermotor	**0,833**	**1,201**
	Jumlah Penduduk	**0,655**	**1,527**
	Pertumbuhan Ekonomi	**0,767**	**1,304**

a. Dependent Variable: PPKB

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Berdasarkan pada tabel 4.3, diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel adalah kurang dari 10. Hal ini, bisa disimpulkan bahwa data yang diuji tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.2.3Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. . Jika *variance* dari *residual* satu pegamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar analisis yang digunakan untuk menetukan heterokedastisitas adalah jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka tekah

terjadi heterokedastistas, Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 4.4

Hasil Uji HeteroskedastisitasModel

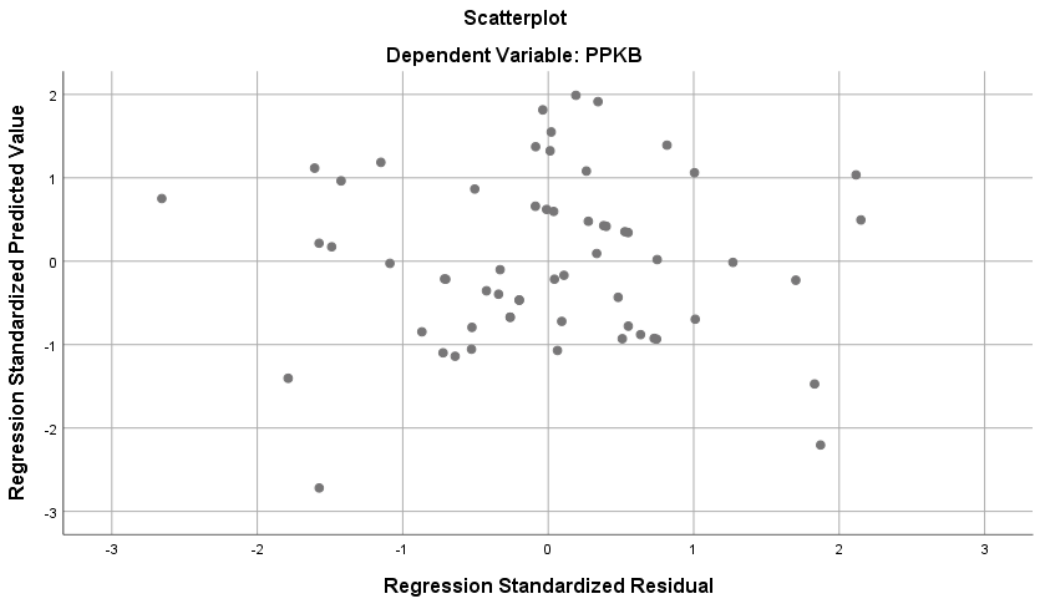

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Berdasarkan pada gambar 4.4, terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik melebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, jadi titik-titik menyebar acak, dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini, bisa disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga data yang digunakan telah memenuhi syarat asumsi klasik untuk dilakukan analisis regresi linear berganda.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji Durbin – Watson (DW Test). Ada beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, diantaranya melalui uji Durbin Watson (DW Test). Tingkat signifikansi yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebesar 5%.

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi Data

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.901[a]	0.811	0.801	0.2773067	1.900
a. Predictors: (Constant), PertumbuhanEkonomi, JumlahKendaraanBermotor, JumlahPenduduk					
b. Dependent Variable: PPKB					

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai DW adalah 1,900. Nilai dU dan dL yang dilihat di tabel Durbin Watson adalah dU dengan k=3, k adalah jumlah variabel independen, dan n (banyaknya data) = 60 adalah 1,6889 dan nilai dL adalah 1,4797. Dapat disimpulkan bahwa dU < DW < 4 – dU ; berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif. 4 – dU = 4 – 1,6889 = 2,3111, maka dapat dilihat 1,6889 < 1,900 < 2,3111. Dapat disimpulkan bahwa model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi baik positif maupun negatif. Hal ini, bisa disimpulkan bahwa data yang diuji tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.2.2.5 Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh Jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4.6

Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,014	0,045		0,307	0,760
	Jumlah Kendaraan Bermotor	0,466	0,059	0,577	7,835	0,000
	Jumlah Penduduk	0,018	0,066	0,023	0,275	0,785
	Pertumbuhan Ekonomi	0,613	0,079	0,593	7,719	0,000

a. Dependent Variable: PPKB

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Berdasarkan pada tabel 4.6 ini maka dapat diperoleh persamaan model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 0{,}014 + 0{,}466X1 + 0{,}018X2 + 0{,}613X3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 0,014. Dengan angka tersebut menunjukkan bahwa jika jumlah kendaraan bermotor (X1), jumlah penduduk (X2), pertumbuhan ekonomi (X3) nilainya nol (0) maka nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) adalah 0,014.

Koefisien X1 nilainya 0,466 yang berarti variabel Jumlah Kendaraan Bermotor (X1) memiliki hubungan positif dengan Penerimaan pajak kendaraan bermotor. Setiap kenaikan sebesar 1 maka Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan terjadi sebesar 0,466 dengan asumsi X2, dan X3 tetap.

Koefisien X2 nilainya 0,018 yang berarti variabel Jumlah Penduduk (X2) memiliki hubungan positif dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Setiap kenaikan sebesar 1 maka Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan terjadi sebesar 0,018 dengan asumsi X1, dan X3 tetap.

Koefisien X3 nilainya 0,613 yang berarti variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3) memiliki hubungan positif dengan Penerimaan pajak kendaraan bermotor. Setiap kenaikan sebesar 1 maka Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan terjadi sebesar 0,613 dengan asumsi X1, dan X2 tetap.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Uji Statistik t (Persial)

Uji t pada dasarnya menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α = 5%).

(a) Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).

(b) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

Tabel 4.7

Hasil Uji Statistik t (Persial)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,014	0,045		0,307	0,760
	Jumlah Kendaraan Bermotor	0,466	0,059	0,577	7,835	0,000
	Jumlah Penduduk	0,018	0,066	0,023	0,275	0,785
	Pertumbuhan Ekonomi	0,613	0,079	0,593	7,719	0,000

a. Dependent Variable: PPKB

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Pada tabel 4.7 didapat hasil uji t (Persial) yang terdapat tiga variabel independen Jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh dari Jumlah Kendaraan Bermotor (X1) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

   Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Jumlah Kendaraan Bermotor (X1)adalah signifikan dengan t-hitung sebesar7,835 dan nilai *Sig.* = 0.000 yang lebih kecil dari 0,05.Dengan demikian hipotesis H1

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Jumlah Kendaraan Bermotor (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)” **diterima**.

2. Terdapat pengaruh dari Jumlah Penduduk (X2) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

   Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Jumlah Penduduk (X2) adalah signifikan dengan t-hitung sebesar 0,275 dan nilai *Sig*. = 0.785 yang lebih besar dari 0,05.Dengan demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Jumlah Penduduk (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)”**ditolak**.

3. Terdapat pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi (X3) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

   Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi (X3) adalah signifikan dengan t-hitung sebesar 7,719 dan nilai *Sig*. = 0.000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis H_3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Pertumbuhan Ekonomi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)” **diterima**.

4.2.3.2 Uji Statistik F(Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Uji kelayakan model ini juga dikenal dengan uji F. Uji F pada hakikatnya mengukur efektifitas model atau mengukur berapa

persen variasi Y yang bisa dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang digunakan, dalam penelitian ini toleransi kesalahan dengan kriteria pengujian tingkat signifikan α = 0,05.

Tabel 4.8

Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA[a]						
Model		**Sum of Squares**	**Df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
1	Regression	17,023	3	5,674	55,117	.000[b]
	Residual	5,765	56	0,103		
	Total	22,788	59			

a. Dependent Variable: PPKB

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Pada tabel 4.8 hasil uji F (Simultan) dapat dilihat nilai *sig* harus lebih kecil dari 0,05. Sesuai hasil uji F nilai *sig* untuk variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi nilainya sebesar 0,000 yang artinya *sig* lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor **diterima.**

4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 4.9

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.901[a]	0.811	0.801	0.2773067	1.900
a. Predictors: (Constant), PertumbuhanEkonomi, JumlahKendaraanBermotor, JumlahPenduduk					
b. Dependent Variable: PPKB					

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui nilai *Adjusted R Square* = 0,801. Hal ini menunjukkan bahwa 80,1 % Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor(Y) dipengaruhi oleh variabel Jumlah Kendaraan Bermotor (X1), Jumlah Penduduk (X2), dan variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3), sedangkansisanya (100 % - 80,1%) yaitu 19,9 % Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor(Y) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Variabel jumlah kendaraan bermotor (X1) memiliki nilai t sebesar 7,835 dan nilai signifikan 0,000< 0,05. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan cenderung meningkat.

Kendaraan bermotor mempunyai keterkaitan dengan teori mutlak/bakti yaitu salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak termasuk pajak kendaraan bermotor. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor harus berkonsekuensi membayar pajak karena merupakan kewajiban kepada negara. Oleh karena itu, warga negara yang lalai dalam membayar pajak dianggap kurang atau tidak berbakti kepada negaranya.

Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nur Radrtya Prawita (2018) yang menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Peneliti Alvan Muhammad (2020) yang menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Variabel jumlah penduduk (X2) memiliki nilai t sebesar 0,275 dan nilai signifikan 0,785> 0,05. Dari hasil pengujian tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor **ditolak**. Pengaruh jumlah penduduk yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ini diartikan bahwa penurunan atau peningkatan jumlah penduduk di Brebes akan berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penduduk berperan dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Halim mengatakan bahwa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar *(ability to pay)* berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Penduduk mempunyai ketrkaitan dengan teori mutlak/bakti bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, oleh karena itu penduduk terikat pada keberadaan negara dan karenanya wajib membayar pajak, dalam arti wajib berbakti kepada negaranya, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak.

Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Dwi *et al* (2021) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Peneliti Nur Radiktya Prawita (2018) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Variabel pertumbuhan ekonomi (X3) memiliki nilai t sebesar 7,719 dan nilai signifikan 0,000< 0,05. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa hipotesis ketiga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor **diterima.** Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan cenderung meningkat.

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak ada pada jasa yang diberikan negara kepada rakyat, yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk itu,diperlukan biaya-biaya yang harus mutlak oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut yaitu dalam bentuk pajak. Semakin besar berbakti, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, wajar jika biaya yang dikeluarkan negara dibebankan kepada masyarakat.

Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami Triani Ayu (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Peneliti Yuskar Febri Yanti *et al* (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab salah satu dugaan yang telah dibuat hipotesis H1 yaitu Jumlah Kendaraan Bermotor (X1), Jumlah Penduduk (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Berdasarkan serangkain pengujian yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan hasil uji F yaitu 55,117 dengan signifikan 0,000< 0,05. yang berarti hal ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji Koefisien determinasi pada tabel 4.9, diketahui nilai *Adjusted R Square* = 0,801. Hal ini menunjukkan bahwa 80,1 % Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor(Y) dipengaruhi oleh variabel Jumlah Kendaraan Bermotor (X1), Jumlah Penduduk (X2), dan variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3), sedangkansisanya (100 % - 80,1%) yaitu 19,9 % Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor(Y) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Ajeng Dwi *et al* (2021) yang secara umum menyatakan bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Peneliti Yuskar Febri Yanti *et al* (2014) secara umum menyatakan hasil penelitian jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Breebes pada periode 2016 – 2020. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan *Software* SPSS versi 25, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

   Berdasarkan hasil uji F dapat dinyatakan bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

   Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa secara persial variabel independen yaitu jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan cenderung meningkat.
3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa secara persial variabel independen yaitu jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ini diartikan bahwa penurunan atau peningkatan jumlah penduduk di Brebes akan berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

   Berdasarkan uji t dapat diartikan bahwa secara persial variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan cenderung meningkat.

5.2 Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan melakukan analisis dan berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan lagi tentang kondisi variabel bebas yang ada pada penelitian ini, karena pada penelitian ini terbukti bahwa ke tiga variabel yang diteliti yaitu jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah bisa mengontrol ke tiga variabel tersebut agar penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat memenuhi target yang diharapkan, dan juga dengan penelitian ini pemerintah akan mempertimbangkan dengan

baik untuk mengambil keputusan dan kebijakan kedepannya mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Pemerintah daerah Brebes hendaknya meningkatkan kinerjanya, dengan cara memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat atau wajib pajak agar wajib pajak nyaman dalam melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan daerah.
3. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi penerimaan pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat dengan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan lokasi penelitian atau variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Anggito (Ed).(2009). Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Agustin, M. M (2017). *Analisis Pengaruh Sektor Transportasi dalam Produk Domestik Bruto (PDRB). Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2015.*Universitas Brawijaya.

Ajeng, D. K. A. (2021). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimatan Selatan Periode 2015-2019*. Institut Pertanian Bogor Jawa Barat Indonesia.

Aji, Purnomo Bayu. (2015). Analisis Sunber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Volume 3 Tahun 2015. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

Alvan, M. S. H. (2020). *'Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.* Universitas Sumatera Utara Medan.

Ariasih, P. N. N. 2011. Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerh Provinsi Bali Tahun 1991-2010. *Jurnal Universitas Udayana* 543-562.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta.

Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN,Yogyakarta, 1999.

Arsyad, Lincoln, *Pengantar perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 1999.

Badan Pusat Statistik (2010*). Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan ahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik indonesia. Jakarta.

Badan Pusat Statistik (2013). *Statistik Indonesia Tahun 2013*. Badan Statistik Indonesia. Jakarta.

Dumadi, Nuru, Indah (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes.

Febriati, Y. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. *Jurnal Eksos* 7(2): 165-185.

Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN.

Indra D. (2015). *'Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Nagan Raya Periode 2008-2012*. Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.

Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Kartika, L. (2020). *'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2018*. Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan.

Lulus, R. P. N. S. (2018). *'Motor Vehicle Tax Compliance Levels: An Empirical Study And The Determining Factors.* Semarang University.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan (edisi revisi 2013). Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Nur, R. P. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016*. Universitas Islam Indonesia.

Nuringsih, M. 2006. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Thesis*. Jurusan Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Oktorolu, R. I. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor*. Universitas Brawijaya.

Prawita. (2008). Undang-Undangan tentang kriteria pemungutan pajak tersebut.

Radiktya, N. P. (2018). '*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rina, T. S. (2018). *'Analisis Kebijakan Earmarked Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015.* Universitas Negeri Semarang.

Ryansyah, O. I (2019). *'Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Periode 2003-2017*. Universitas Brawijaya Malang.

Sari, D. P. (2016) '*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu', Jurnal Akuntansi, 6(1), pp. 75-84.*

Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset.* Jakarta: Salemba Empat.

Sarwono, Jonathan. 2006. *MetodePenelitian Kuantitatif & Kualitiatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soemitro, Rochmat. (1990). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Penerbit Eresco.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B. alfa*.

Syafruddin. 2003. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. *Tesis* : Ilmu Administasi Universitas Indonesia.

Suparmoko,(2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah.*Yogyakarta:Penerbit Andi Offside.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Universitas Andalas.

UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No. 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Utami, A. T. (2014). Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Universitas Diponegoro.*

Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Yuskar, F. Y. (2014) . *'Analisi Efektivitas dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat Periode 2007-2011*. Universitas Andalas.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Data SPSS

Realisasi Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Brebes Tahun 2016-2020

Tahun	X1 _ JKB	X2_JP	X3_PE	Y_PPKB
2016	90.085,00	1.765.803	0,0598	7.394.836.475
2016	90.848,00	1.767.701	0,0550	6.645.300.475
2016	91.617,00	1.769.601	0,0488	7.120.806.150
2016	92.392,00	1.771.504	0,0585	6.698.279.825
2016	93.175,00	1.773.408	0,0577	7.544.847.175
2016	93.964,00	1.775.315	0,0472	8.520.257.450
2016	94.756,00	1.777.223	0,0367	7.777.268.800
2016	95.562,00	1.779.134	0,0463	8.893.247.025
2016	96.371,00	1.781.046	0,0458	8.645.123.625
2016	97.187,00	1.782.961	0,0553	9.217.416.975
2016	98.010,00	1.784.877	0,0478	9.215.587.250
2016	98.840,00	1.788.880	0,0543	10.980.849.675
2017	99.238,00	1.789.474	0,0511	9.785.821.500
2017	101.903,00	1.790.067	0,0517	7.788.659.675
2017	104.640,00	1.790.662	0,0587	8.708.856.650
2017	107.451,00	1.791.256	0,0589	7.780.647.050
2017	110.337,00	1.793.040	0,0586	9.373.365.550

2017	113.300,00	1.792.445	0,0615	8.096.861.150
2017	116.343,00	1.793.040	0,0596	11.914.748.000
2017	119.468,00	1.791.850	0,0558	11.326.669.550
2017	122.676,00	1.794.230	0,0551	10.970.404.350
2017	125.971,00	1.794.826	0,0554	11.445.835.675
2017	129.354,00	1.795.421	0,0557	11.100.936.850
2017	130.829,00	1.796.004	0,0560	10.827.975.775
2018	131.222,00	1.796.573	0,0565	10.156.371.800
2018	134.786,00	1.797.142	0,0568	7.906.453.550
2018	138.446,00	1.798.280	0,0571	8.841.273.500
2018	142.207,00	1.797.711	0,0474	8.545.262.025
2018	146.069,00	1.798.849	0,0551	9.470.312.550
2018	150.037,00	1.799.419	0,0484	8.757.681.850
2018	154.112,00	1.800.559	0,0544	11.119.129.075
2018	158.298,00	1.799.989	0,0487	10.586.900.300
2018	162.597,00	1.801.129	0,0490	10.447.297.775
2018	167.013,00	1.801.699	0,0533	11.917.788.900
2018	171.549,00	1.802.270	0,0516	11.446.678.500
2018	172.209,00	1.802.829	0,0529	13.348.778.950
2019	173.991,00	1.803.341	0,0526	11.955.455.975
2019	175.666,00	1.803.853	0,0538	9.504.648.725
2019	177.357,00	1.804.365	0,0561	9.659.945.700
2019	179.064,00	1.804.878	0,0594	9.234.822.825

2019	180.788,00	1.805.391	0,0586	10.611.000.275
2019	182.528,00	1.805.904	0,0598	9.229.950.150
2019	184.285,00	1.806.417	0,0581	11.514.830.925
2019	186.059,00	1.806.930	0,0593	11.183.498.475
2019	187.850,00	1.807.443	0,0576	11.151.391.175
2019	189.658,00	1.807.957	0,0577	11.588.290.225
2019	191.484,00	1.808.471	0,0561	10.863.177.475
2019	193.327,00	1.808.975	0,0573	12.689.358.000
2020	194.090,00	1.823.124	0,0572	11.292.745.575
2020	195.958,00	1.837.383	0,0336	9.846.942.575
2020	197.844,00	1.851.754	0,0202	9.789.396.726
2020	199.749,00	1.866.237	-0,0170	6.726.513.000
2020	201.672,00	1.880.834	-0,0141	7.271.382.500
2020	203.613,00	1.895.545	-0,0313	10.889.599.900
2020	205.573,00	1.910.370	-0,0467	10.106.409.700
2020	207.552,00	1.925.312	-0,0262	9.583.480.375
2020	209.550,00	1.940.371	-0,0250	9.231.382.000
2020	211.567,00	1.955.547	-0,0062	9.369.059.000
2020	213.604,00	1.970.842	-0,0098	9.716.755.500
2020	215.660,00	1.978.760	-0,0059	10.900.212.750

Lampiran 2

Laporan Realisasi Data Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

NO	Tahun	Jumlah Kendaraan
1	2016	90,085
2	2017	99,238
3	2018	131,222
4	2019	173,991
5	2020	194.090

NO	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2016	1.788.880
2	2017	1.796.004
3	2018	1.802.829
4	2019	1.808.975
5	2020	1.978.760

Tahun	Jumlah	%
2016	37.448.715,50	5,11 %
2017	39.963.111,45	6,65 %
2018	42.973.395,36	5,26 %
2019	46.178.657,58	-0,47%
2020	47.074.595,60	2,33%

No	Bulan	Realisi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jan	7,394,836,475	9,785,821,500	10,156,371,800	11,955,455,975	11,292,745,575
2	Feb	6,645,300,475	7,788,659,675	7,906,453,550	9,504,648,725	9,846,942,575
3	Mar	7,120,806,150	8,708,856,650	8,841,273,500	9,659,945,700	9,789,396,726
4	Apr	6,698,279,825	7,780,647,050	8,545,262,025	9,234,822,825	6,726,513,000
5	Mei	7,544,847,175	9,373,365,550	9,470,312,550	10,611,000,275	7,271,382,500
6	Jun	8,520,257,450	8,096,861,150	8,757,681,850	9,229,950,150	10,889,599,900
7	Jul	7,777,268,800	11,914,748,000	11,119,129,075	11,514,830,925	10,106,409,700

8	Agust	8,893,247,025	11,326,669,550	10,586, 900,300	11,183,498,475	9,583,480,375
9	Sep	8,645,123,625	10,970,404,350	10,447,297,775	11,151,391,175	9,231,382,000
10	Okt	9,217,416,975	11,445,835,675	11,917,788,900	11,588,290,225	9,369,059,000
11	Nov	9,215,587,250	11,100,936,850	11, 446,678,500	10,863,177,475	9,716,755,500
12	Des	10,980,849,675	10,827,975,775	13,348,778,950	12,689,358,000	10,900,212,750
TOTAL		**98,653,820,900**	**119,120,781,755**	**122,543,928,775**	**129,186,369,925**	**114,723,879,601**
Realisasi %		109.79	102.69	104.86	101.32	92.15

Lampiran 3 :

Surat Izin Penelitian

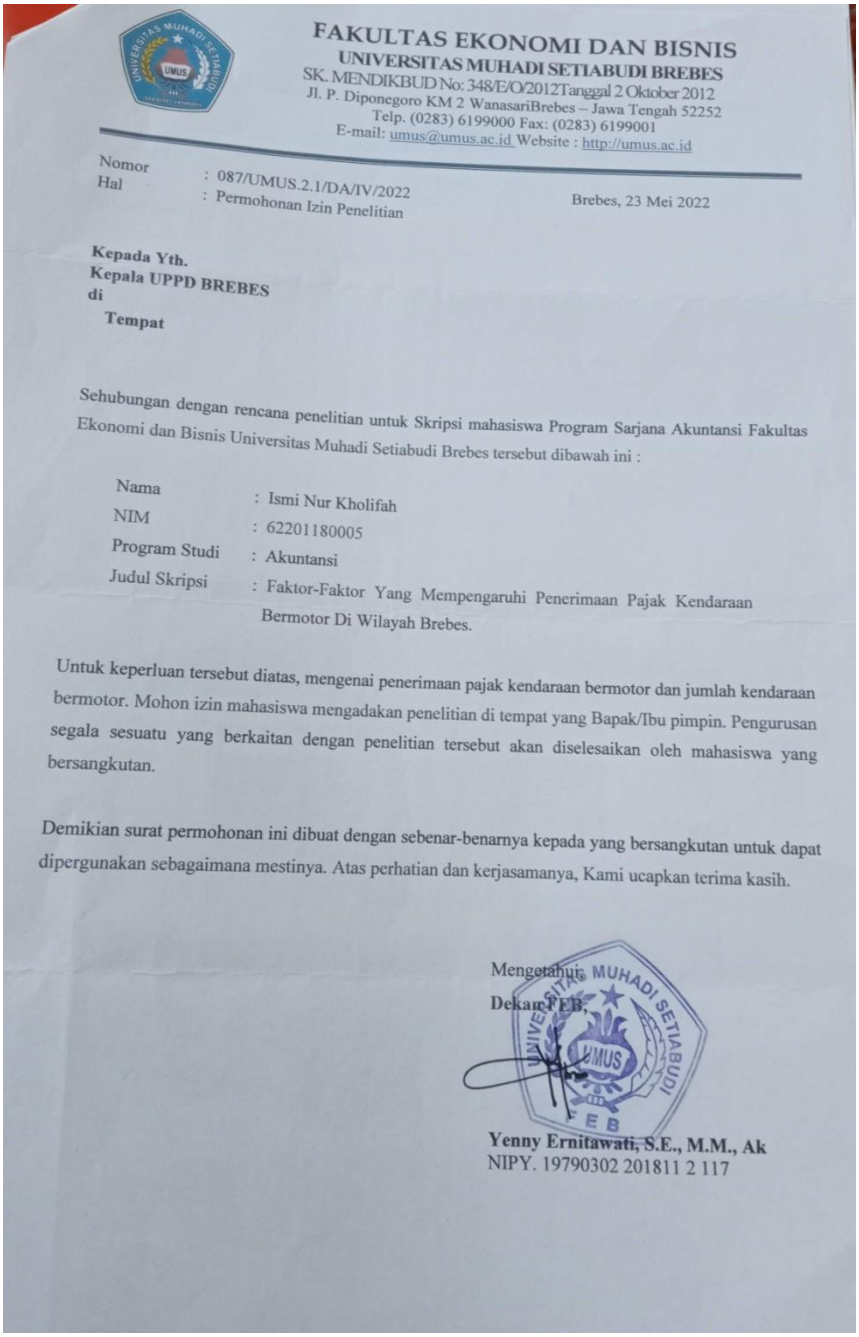

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI BREBES
SK. MENDIKBUD No: 348/E/O/2012Tanggal 2 Oktober 2012
Jl. P. Diponegoro KM 2 WanasariBrebes – Jawa Tengah 52252
Telp. (0283) 6199000 Fax: (0283) 6199001
E-mail: umus@umus.ac.id Website : http://umus.ac.id

Nomor : 087/UMUS.2.1/DA/IV/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Brebes, 23 Mei 2022

Kepada Yth.
Kepala UPPD BREBES
di
Tempat

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Skripsi mahasiswa Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi Brebes tersebut dibawah ini :

Nama	: Ismi Nur Kholifah
NIM	: 62201180005
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Brebes.

Untuk keperluan tersebut diatas, mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor. Mohon izin mahasiswa mengadakan penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dekan FEB,

Yenny Ernitawati, S.E., M.M., Ak
NIPY. 19790302 201811 2 117

Lampiran 4 :

Surat Balasan Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
UPPD KABUPATEN BREBES
JL. GAJAHMADA NO. 60 Telp./ Fax. (0283) 671622 / 671621
KABUPATEN BREBES

Brebes, 27 Mei 2022

Nomor : 074 /760/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K E P A D A Yth.:
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhadi Setiabudi Brebes
di-
TEMPAT

Berdasarkan surat Saudara nomor 087/UMUS.2.1/DA/IV2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, selama menjalankan penelitian mahasiswa agar tetap berpedoman pada ketentuan aturan tata tertib yang berlaku pada kantor dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya hal-hal yang bersifat teknis dapat menghubungi dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Brebes

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA UPPD KABUPATEN BREBES
KASUBBAG TATA USAHA

PEMPROV JATENG
UPPD KABUPATEN BREBES
BAPENDA

ACHMAD MUBJAHIDIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19690919 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris BAPENDA Prov. Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Pertinggal.

Lampiran 5

Hasil Output SPSS 25

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JumlahKendaraan	60	90,085	194,090	139,459	41,200
JumlahPenduduk	60	1,788,880	1,978,760	1,838,254	74,814
PertumbuhanEkonomi	60	-0.470	6.650	3.730	2.566
PPKB	60	6,645,300,475	13,348,778,950	9,737,146,350	1,593,844,397
Valid N (listwise)	60				

SPSS 25

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandariz ed Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,000
	Std. Deviation	0,313
Most Extreme Differences	Absolute	0,090
	Positive	0,090
	Negative	-0,059
Test Statistic		**0,090**
Asymp. Sig. (2-tailed)		**.200[c,d]**

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

SPSS 25

Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah Kendaraan Bermotor	**0,833**	**1,201**
	Jumlah Penduduk	**0,655**	**1,527**
	Pertumbuhan Ekonomi	**0,767**	**1,304**

a. Dependent Variable: PPKB

SPSS 25

Uji Heteroskedastisitas

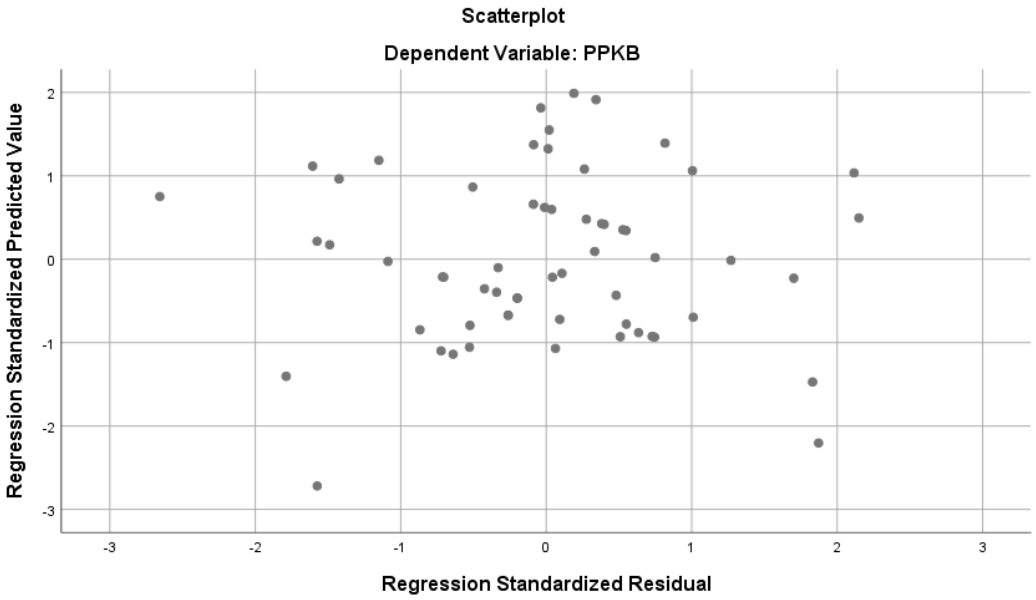

SPSS 25

Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.901[a]	0.811	0.801	0.2773067	1.900
a. Predictors: (Constant), PertumbuhanEkonomi, JumlahKendaraanBermotor, JumlahPenduduk					
b. Dependent Variable: PPKB					

SPSS 25

Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,014	0,045		0,307	0,760
	Jumlah Kendaraan Bermotor	0,466	0,059	0,577	7,835	0,000
	Jumlah Penduduk	0,018	0,066	0,023	0,275	0,785
	Pertumbuhan Ekonomi	0,613	0,079	0,593	7,719	0,000

a. Dependent Variable: PPKB

SPSS 25

Uji Statistik t (Persial)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,014	0,045		0,307	0,760
	Jumlah Kendaraan Bermotor	0,466	0,059	0,577	7,835	0,000
	Jumlah Penduduk	0,018	0,066	0,023	0,275	0,785
	Pertumbuhan Ekonomi	0,613	0,079	0,593	7,719	0,000

a. Dependent Variable: PPKB

SPSS 25

Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA[a]						
Model		**Sum of Squares**	**Df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
1	Regression	17,023	3	5,674	55,117	.000[b]
	Residual	5,765	56	0,103		
	Total	22,788	59			

a. Dependent Variable: PPKB

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk

SPSS 25

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.901[a]	0.811	0.801	0.2773067	1.900
a. Predictors: (Constant), PertumbuhanEkonomi, JumlahKendaraanBermotor, JumlahPenduduk					
b. Dependent Variable: PPKB					

SPSS 25

Lampiran 6

Izin Penelitian Ke Kantor UPPD Brebes